

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

Skripsi, July 2024

CINTYA FEBRIANTI NURAINI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MITIGASI BANJIR DI BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA  
TANGERANG SELATAN

XVII+131 Halaman+3 Tabel+6 Lampiran

**ABSTRAK**

Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu wilayah yang rawan banjir, dengan berbagai faktor yang mempengaruhi, seperti kurangnya komunikasi antarorganisasi perangkat daerah dan lemahnya pengawasan tata ruang. Pembangunan yang tidak terkendali oleh beberapa pengembang besar telah menyempitkan aliran sungai, sementara sistem drainase dan penyerapan air yang tidak optimal turut memperparah situasi. Dalam upaya mitigasi banjir, koordinasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Lingkungan Hidup sangat diperlukan untuk memastikan upaya antisipatif dan solusi yang berkelanjutan. Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang ada, termasuk rencana tata ruang wilayah dan pedoman teknis pengendalian banjir, menjadi landasan penting untuk penanganan banjir di wilayah tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan mitigasi bencana banjir pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana. Penelitian ini menggunakan teori *George C. Edward III*. dengan 4 indikator yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesatuan tindakan dalam penanganan banjir masih menghadapi kendala, di mana Dinas Lingkungan Hidup belum sepenuhnya melaksanakan tanggung jawab dalam pemeliharaan sampah di saluran drainase dan sungai. Pola komunikasi organisasi perangkat daerah sudah berjalan cukup baik, dengan adanya komunikasi yang intens antar instansi. Namun, pembagian tugas belum optimal, ditunjukkan oleh kurangnya kesadaran beberapa organisasi perangkat daerah terhadap tanggung jawabnya; BPBD sebagai koordinator belum melakukan sosialisasi mengenai wilayah rawan bencana, dan Dinas Pekerjaan Umum belum melakukan perawatan rutin pada jaringan drainase. Meskipun demikian, tingkat disiplin yang diterapkan dalam pelaksanaan tugas oleh organisasi perangkat daerah dan BPBD sudah berjalan cukup baik.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Peraturan Daerah, Mitigasi Bencana Banjir

Daftar Pustaka: 15 Buku+10 Jurnal+3 Dokumen

Dosen Pembimbing: Abdul Rahman

*FACULTY OF SOCIAL ACIENCE AND POLITICAL SCIENCE*

*PUBLIC ADMINISTRATION STUDY PROGRAM*

*Thesis, July 2024*

*CINTYA FEBRIANTI NURAINI*

*THE IMPLEMENTATION OF FLOOD DISASTER MITIGATION POLICY  
TOWARD TANGERANG SELATAN REGIONAL DISASTER MANAGEMENT  
AGENCY*

*XVII+131 Pages+3 Tables+6 Attachements*

***ABSTRACT***

*South Tangerang City is one of the areas prone to flooding, with various influencing factors, such as a lack of communication between local government organizations and weak spatial planning supervision. Uncontrolled development by several large developers has constricted river flows, while suboptimal drainage and water absorption systems have exacerbated the situation. In flood mitigation efforts, coordination between the Regional Disaster Management Agency, the Public Works Agency and the Environment Agency is necessary to ensure anticipatory efforts and sustainable solutions. Existing Regional Regulations and Governor Regulations, including regional spatial plans and technical guidelines for flood control, are an important foundation for flood management in the region. The purpose of this research is to find out and analyze how the implementation of flood disaster mitigation policies in Regional Regulation Number 2 of 2012 concerning Disaster Management. This research uses the theory of George C. Edward III. with 4 indicators, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results showed that the unity of action in handling floods still faced obstacles, where the Environmental Agency had not fully carried out its responsibilities in maintaining waste in drainage channels and rivers. The communication pattern of regional apparatus organizations has been running quite well, with intense communication between agencies. However, the division of tasks has not been optimal, as indicated by the lack of awareness of some regional apparatus organizations towards their responsibilities; BPBD as the coordinator has not conducted socialization regarding disaster-prone areas, and the Public Works Office has not conducted routine maintenance on the drainage network. Nonetheless, the level of discipline applied in the implementation of tasks by regional apparatus organizations and BPBD has been running quite well.*

*Keywords: Implementation, Policy, Regional Regulation, Flood Disaster Mitigation*

*Bibliography: 15 Books+10 Journals+3 Document*

*Instructor: Abdul Rahman*